

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tumbuhnya kesadaran mengenai perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup di antara bangsa-bangsa se-kawasan, sekaligus meredakan rasa saling curiga, telah mendorong negara-negara di Kawasan Asia Tenggara untuk terus mengupayakan perluasan kerjasama. Perkembangan geopolitik di Asia Tenggara dan meredanya rasa saling curiga itu juga telah mempengaruhi usaha-usaha untuk mencari pemecahan bersama atas berbagai masalah yang dihadapi negara-negara ASEAN.

Kini, Perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) secara resmi telah memiliki Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Dengan berlakunya *ASEAN Charter* diharapkan dapat memberi irama baru bagi ASEAN yang menjalin kerjasama atas dasar kesukarelaan. Sejak didirikan tahun 1967, ikatan ASEAN bersifat longgar, walaupun ASEAN telah memperlihatkan keberhasilannya selama dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Piagam ASEAN pada dasarnya mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan. Kerjasama dalam wilayah ASEAN dewasa ini mulai difokuskan untuk membentuk komunitas ASEAN pada 2015. Komunitas ASEAN merupakan upaya

ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi perkembangan politik internasional

ASEAN telah berkomitmen menyepakati dan mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).

Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community/APSC*). Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community/ASCC*). Konsep komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga rencana aksi sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010.

Pencapaian komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an*

ASEAN *Community* 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam rangka mencapai komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun *blueprint* (Cetak Biru) dari ketiga pilar komunitas politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.

Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya diantara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Dalam pilar pertama Komunitas ASEAN yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*Asean Political Security Community/APSC*) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas politik keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). Komunitas Politik Keamanan juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada pada seperti Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN*), traktat persahabatan dan kerjasama negara-negara ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*) dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Treaty on Southeast*

Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ) selain mentaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.¹

Indonesia selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori Rencana Aksi Komunitas ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development, Shapping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post Conflict Peace Building, dan Implementing Mechanism*. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan dalam Progran Aksi Vientiane (*Vientiane Action Program/VAP*) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Politik Keamanan ASEAN dilakukan melalui *ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCCO)*. Sampai dengan tahun 2008, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali dan terus mengkoordinasikan langkah bersama untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015.

Bersamaan dengan ditandatanganinya *ASEAN Charter*, para pemimpin ASEAN juga menandatangani *Blueprint ASEAN Economic Community / Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN* yang merupakan *master plan* ASEAN menuju terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada tahun 2015. Cetak biru

¹Tim Penyusun, *ASEAN Selayang Pandang 2010 edisi ke-19* (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2011)

tersebut mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas. Target waktu tersebut terbagi dalam 4 (empat) fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yakni untuk mewujudkan ASEAN sebagai:

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu: (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kerja terampil, dan (v) aliran modal yang lebih bebas. Disamping kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua) komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (*Sector Integration Priority/PIS*) dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama yaitu : (i) kebijakan persaingan usaha, (ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan, dan (vi) e-commerce.
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu : (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) inisiatif integrasi ASEAN (*Inisiatif for ASEAN Integration/IAI*).

4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii) peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik secara individu antar negara anggota maupun sebagai kawasan dalam persaingan dengan kawasan atau negara lain. Untuk menciptakan kawasan yang berdaya saing tinggi, kesenjangan pembangunan antar negara anggota harus diperkecil sehingga setiap individu negara anggota ASEAN memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang setara. Pencapaian atas ketiga hal tersebut sangat diperlukan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang siap terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global.

Cetak Biru Komunitas ASEAN juga memuat pedoman umum yang dituangkan dalam jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing karakteristik utama KEA. Untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN wajib melaksanakan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka (*open*), berwawasan ke luar (*outward-looking*), inklusif (*inclusive*), dan berorientasi pada pasar (*market-driven*) sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta mempertahankan perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN melalui penerapan formulasi ASEAN minus X. Selain itu, ASEAN harus patuh terhadap sistem berdasarkan aturan

hukum (*rules based systems*) agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.

Dalam rangka memantau implementasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN telah mengembangkan mekanisme *Scorecard* sebagai alat untuk mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN dan sekaligus sebagai alat komunikasi dengan para pemilik kepentingan mengenai keseriusan ASEAN dalam mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. *Scorecard* dimaksud memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan yang telah dicapai ASEAN dalam mengimplementasikan Cetak Biru KEA pada tahun 2015. Negara-negara ASEAN telah menyepakati 4 bentuk *AEC Scorecard* yaitu untuk Kepala Negara/Pemerintah, Menteri, Pejabat Senior, dan Masyarakat Umum.

Proses penyempurnaan *scorecard* hingga saat ini masih terus dilakukan oleh ASEAN bekerjasama dengan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Economic Research Institute for ASEAN and East Asia/ERIA*), sebuah lembaga riset yang membantu ASEAN dalam mempromosikan integrasi ekonomi ASEAN dan integrasi ekonomi Asia Timur yang lebih luas.

Pilar ketiga dalam Komunitas ASEAN adalah Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Pilar ini kemudian dijabarkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuang dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu titik tolak utama meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling

peduli dan berbagi. Kerjasama di bidang sosial budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, perempuan, perlindungan anak, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan Yayasan ASEAN.

Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan pilar yang saling terkait dan saling melengkapi dalam kerangka pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015. Bersama-sama dengan Pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community*) dan Pilar Komunitas Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), Pilar Sosial Budaya dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses pengintegrasian di ASEAN dalam rangka mendukung upaya mewujudkan perdamaian di kawasan, meningkatkan kesejahteraan serta memperkokoh persaudaraan di kalangan masyarakat ASEAN.

Sebagai satu komunitas sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja-sama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidupnya melalui kerjasama pendidikan dan kebudayaan.

ASEAN juga membuka akses seluas-luasnya bagi penduduknya dengan memperhatikan keseimbangan jender di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia, membangun kualitas hidup yang lebih baik,

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta terus melakukan pengawasan penyebaran wabah penyakit, pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan dan penyeludupan narkoba, penurunan kualitas lingkungan dan polusi lintas batas. Untuk dapat mencapai kerjasama yang baik di seluruh sektor pemerintahan ASEAN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan *good governance* serta meningkatkan keterlibatan masyarakat madani (*civil society*).

Guna mewujudkan semua itu, warga ASEAN harus menciptakan “*rasa ke-kita-an*” (*We Feeling*) yang begitu penting bagi manusia dalam membentuk sebuah komunitas. Masyarakat ASEAN juga perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan solidaritas yang lebih besar sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi komunitas yang saling peduli dan berbagi. Dengan demikian, masyarakat ASEAN akan lebih mengenal benang merah yang ada di dalam budaya mereka yang sangat beragam dan akan lebih mampu menghargai identitas nasional satu sama lain. ASEAN diharapkan dapat menyelesaikan segala sengketa secara damai dan bersahabat. Dengan rasa “*ke-kita-an*” tersebut, warga ASEAN akan dapat mewariskan kepada generasi selanjutnya sebuah kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman dan damai, bukan saja sebagai kawasan yang bebas tetapi juga mampu mengelola sengketa dengan bijaksana.

Situasi ekonomi global yang tidak menentu belakangan ini ternyata semakin memperkokoh komitmen ASEAN dan para mitranya untuk meningkatkan kerja sama dan mencari prakarsa-prakarsa baru untuk mewujudkan

kawasan yang kompetitif, inklusif, merata dan memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi.²

ASEAN Economic Community (AEC) dapat menjadi suatu terobosan bagi perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk yang mendominasi kawasan Asia Tenggara dapat menjadikan Indonesia sebagai tujuan pasar asing dan menjadi tempat pergerakan lahan modal asing, sehingga diharapkan nantinya Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dengan adanya *AEC* tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama ekonomi dengan mitra dagang yang lebih besar, seperti China dan India untuk memperbesar keuntungan dan penyebaran produk ke pasar yang lebih luas.

Dengan terciptanya integrasi kawasan dalam bentuk *ASEAN Economic Community (AEC)* selain merupakan suatu tantangan yang akan dihadapi negara di kawasan tersebut, perlu diperhatikan masalah-masalah yang akan ditimbulkan. Masalah tersebut lebih kepada kesiapan negara anggota khususnya, Indonesia untuk menghadapi persaingan ekonomi global yang bersifat terbuka dan represif. Indonesia perlu segera memperhatikan faktor-faktor pendukung, baik internal maupun eksternal agar dampak yang ditimbulkan di kemudian hari akibat arus barang dan jasa yang bebas, memberikan dampak dan pengaruh yang positif.

Dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan agresifitas ekonomi global melalui negara-negara industri maka secara langsung maupun tidak akan memberikan dampak atau efek

²Pernyataan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam siaran pers, ASEAN Perkokoh Kerjasama Ekonomi, *Harian Ekonomi Neraca* 28 Desember 2011, Selasa, 27 Desember 2011

perubahan stabilitas ekonomi di suatu negara. Pengaruh perubahan ekonomi global yang drastis dengan isu perdagangan bebas antar kawasan memaksa organisasi regional Asia Tenggara atau ASEAN untuk segera menjawab persoalan yang akan dihadapi negara anggotanya tersebut. Belum lagi dengan persaingan dengan China dan India yang melaju sangat pesat membuat ASEAN merasa perlu untuk segera mempercepat proses *ASEAN Economic Community (AEC)*. Bentuk kerjasama yang akan diaplikasikan tahun 2015 ini memberikan suatu jawaban terhadap konsep liberalisme yaitu perlunya suatu integritas bersama didalam kawasan regional dalam bentuk kerjasama ekonomi terbuka antar negara anggota ASEAN.

Dengan demikian, rasa optimisme dari beberapa kalangan intelektual hubungan internasional ketika mengkaji fenomena regionalisme Postur baru ASEAN abad 21 merupakan bagian dari kebangkitan ASIA sebagai bagian integral dalam melihat *ASEAN Economic Community (AEC)*, yakni ASEAN akan menuju pusran pasar tunggal dan basis produksi, ditandai dengan peredaran barang dan jasa, investasi, pekerjaan terampil dan aliran modal yang lebih bebas pada tahun 2020. AEC akan jauh lebih berarti ketimbang AFTA, yang hanya membebaskan perdagangan barang (atas komoditas tertentu saja), dan belum menyentuh aliran bebas sector jasa, pekerja, modal. Selanjutnya kebebasan perdagangan antara negara ASEAN tersebut akan lebih terjamin dengan adanya satu komunitas perekonimian. Sehingga AEC bisa dikatakan sebagai upaya lompatan jauh kedepan dan merupakan kelanjutan berarti dari AFTA itu sendiri.

Dengan motif AEC akan mampu bersaing secara kompetitif dilingkungan regional Asia Pasifik maupun global terutama dengan fenomena kebangkitan China dan India serta mewujudkan AEC, negara-negara ASEAN jelas bergerak ke arah yang lebih dalam (*deeping procces*) integrasi ekonomi.

Kemajuan pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terutama terjadi pada pilar pertama yakni pasar tunggal dan basis produksi regional. Setelah itu disusul pilar keempat yaitu integrasi dengan perekonomian dunia, serta pilar kedua yakni kawasan yang berdayasaing tinggi,. Sementara pilar ketiga yaitu pembangunan ekonomi yang merata masih perlu mendapatkan perhatian.³

Di tahun 2011 di bawah kepemimpinan Indonesia memiliki tiga prioritas utama dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN. Pertama, memperkuat kerja sama internal ASEAN. Kedua, meningkatkan utilisasi kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif yang dicapai oleh ASEAN dengan mitra dialognya. Dan ketiga,, visi dan cetak biru setelah 2015, difokuskan pada pemerataan pembangunan khususnya terkait dengan UKM

Selaku Ketua ASEAN 2011, Indonesia mendorong pilar pembangunan ekonomi yang merata antara negara ASEAN dan di dalam masing-masing ekonomi ASEAN. Diperlukan peningkatkan kapasitas produktif di negara-negara anggota ASEAN . Hal itu guna mengambil manfaat dari proses integrasi ekonomi

³*Ibid.*

yang tengah berjalan. Hal ini menjadi prioritas nasional Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam kepemimpinan Indonesia, ada perkembangan penting yakni bergabungnya Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam forum *East Asia Summit*. Selama ini forum keanggotannya terdiri dari sepuluh negara ASEAN beserta keenam mitra dialognya yakni Australia, India, Jepang, Korea, RRT dan Selandia Baru⁴. Masuknya AS dan Rusia ke dalam forum EAS ini diyakini akan menciptakan keseimbangan dinamis di kawasan ini dengan ASEAN sebagai hub-nya. Ini sejalan dengan aspirasi Piagam ASEAN agar sentralitas ASEAN terus dipertahankan dalam dinamika pertumbuhan regional yang bersifat inklusif.

Integrasi Ekonomi ASEAN dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih luas, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan. Dalam hal ini Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas ASEAN berusaha mempersiapkan kualitas diri untuk dapat memanfaatkan peluang dalam AEC 2015 dan tentunya harus bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat implementasi AEC 2015 tidak terjadi.

⁴Pernyataan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Kerjasama Ekonomi ASEAN di Prioritaskan Tiga Hal, *kabarbisnis.com* **Online:** Rabu, 19 Januari 2011 | 06:44 wib ET

Secara teoritis, integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya, diantaranya melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi termasuk terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan berbagai peluang dan kebijakan yang ditawarkan melalui Kerjasama Ekonomi ASEAN dan seluruh Mitra Strategisnya dalam konteks ASEAN Community pada 2015 nanti, hal ini merupakan tantangan bagi perumusan kebijakan-kebijakan nasional, dunia ekonomi, dan pelaku ekonomi di Indonesia dalam peningkatan investasi dan perdagangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara khususnya.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

**“KERJASAMA EKONOMI ASEAN DALAM *KONTEKS ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY* DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PELUANG INDONESIA MENJADI KEKUATAN EKONOMI
KAWASAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas tentunya akan berkembang, karena setiap variabel saling terkait satu sama lain sehingga penulis perlunya melakukan

identifikasi masalah. Masalah yang diteliti diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan ASEAN dalam mempercepat dan memperkuat integrasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara?
2. Bagaimana proses kesiapan Indonesia dan Negara-negara ASEAN menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015?
3. Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara sesama anggota ASEAN dan Mitra Strategisnya?
4. Sejauhmana peluang, hambatan, keunggulan dan kelemahan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi di kawasan (Asia Tenggara) dilihat dari proses kesiapan Indonesia menuju AEC 2015?

1. Pembatasan Masalah

Karena permasalahan dalam penelitian ini begitu luas dan kompleks, maka penelitian akan difokuskan pada proses kesiapan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di kawasan dalam konteks *ASEAN Economic Community* 2015.

2. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penganalisaan permasalahan sebagaimana yang telah dipilih pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis selanjutnya akan mencoba untuk membuat perumusan masalah, yaitu:

“Bagaimanakah proses kesiapan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di kawasan (Asia Tenggara) dalam konteks *ASEAN Economic Community 2015*: analisis peluang, hambatan, keunggulan dan kelemahan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan bidang yang sedang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan ASEAN dalam mempercepat dan memperkuat integrasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses kesiapan Indonesia dan seluruh Negara Anggota ASEAN menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)2015*.
3. Untuk mengetahui bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara sesama ASEAN dan Mitra Strategisnya.
4. Untuk mengetahui sejauhmana peluang, hambatan, keunggulan dan kelemahanIndonesia menjadi kekuatan ekonomi di kawasan dilihat dari proses kesiapan Indonesia menuju *ASEAN Economic Community 2015*.

2. Kegunaan Penelitian

Dibawah ini akan diuraikan beberapa kegunaan penelitian yang ingin penulis capai, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu jalan dalam menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman, khususnya menyangkut Hubungan Internasional.
2. Untuk pihak lain, semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi tambahan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.
3. Lebih jauh lagi, melalui penelitian ini diharapkan semoga penulis bisa membantu memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, khususnya Ilmu Pengetahuan Hubungan Internasional.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang diteliti.

Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai instrumen yang membantu peneliti untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang akan terjadi dan mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan dalam melakukan analisis.

Untuk menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang berlangsung dalam Hubungan Internasional, perlu diketahui apa definisi dari Hubungan Internasional itu sendiri. Dengan bermula dari adanya kondisi saling ketergantungan antar negara yang semakin mendesak, timbul satu keinginan diantara mereka untuk menjalin hubungan kerjasama yang berkembang dalam satu pola yang jelas, yang dinamakan Hubungan Internasional.

Serangkaian pendapat yang begitu banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu Hubungan Internasional, penulis mengambil beberapa pandangan pada masalah yang dikemukakan untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penulisan skripsi ini. Ilmu Hubungan Internasional berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang semakin luas. Proses perluasan tersebut tidak terlepas dari keadaan politik dari masing-masing negara anggota masyarakat internasional dan hubungan yang diselenggarakan masing-masing negara tersebut.

Adapun bentuk dari Hubungan Internasional itu sangat luas, tidak hanya mengacu pada hubungan antar dua negara tetapi juga terdapat kerjasama atau hubungan antara negara dengan organisasi internasional yang ada di dunia. Hal tersebut dikemukakan dengan jelas oleh **Suwardi Wiriatmadja** dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang dikutip dari **Tryge Matheisen** yaitu: “Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi yang meliputi aspek-

aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dan politik internasional.”⁵

Selain itu, **Norman D. Palmer** dan **Howard C. Perkins**, dalam bukunya *Methodology in The Study of International Relation*, menyatakan:

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala interaksi di antara negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau negara saja tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Interaksi yang terjadi antara negara-negara beserta dengan segala aspek-aspeknya merupakan sebuah hakekat dari Hubungan Internasional.⁶

K.J Holsti dalam bukunya *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* terjemahan Wawan Juanda, memberikan batasan mengenai Hubungan Internasional, sebagai berikut:

“... Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori pemerintah ataupun tidak. Hubungan Internasional juga mencakup studi-studi perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”.⁷

Lebih terperinci, **Theodore A Coulombis** dan **James H. Wolfe** dalam karyanya yang berjudul *Introduction to International Relation, Power and Justice*, mengemukakan tentang gejala-gejala yang termasuk ke dalam ruang lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional, sebagai berikut : *“Wars, International Conference, Diplomacy, Olympic Games, Espionage, Trade, Foreign aid immigration, Hijacking, World-wide epidemics violent revolutions – all these*

⁵Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1967), hlmn. 1.

⁶Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, *Methodology in The Study of International Relation* (New York , USA: Hall. Inc.Englewood Cliffs,1986), hlmn. 14.

⁷K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* terjemahan Wawan Juanda (Bandung: Binacipta,1992), hlmn. 20.

phenomena fall within the expanding scope of the discipline of international relations.”⁸

Maka, untuk lebih jelas mengenai tujuan dasar suatu studi Hubungan Internasional maka penulis mengutip pernyataan yang dikemukakan **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Ilmu dan Metodologi* menyatakan bahwa: “Pada dasarnya studi hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, di dalam wujud arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.”⁹

Pernyataan akan adanya aktor Hubungan Internasional diungkapkan oleh **Daniel S. Paap**: “Aktor-aktor Hubungan Internasional, yang berkaitan dengan pemerintah (*Inter-Governmental Organizations/IGOs*), non-pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGOs*) perusahaan multinasional (*Multi-National Companies/MNCs*), serta individu-individu dan aktor-aktor lain.

Dengan melihat rumusan definisi diatas, ruang lingkup Hubungan Internasional sangat luas, mencakup segala interaksi antara masyarakat suatu negara dan masyarakat negara lain, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dimana satu sama lain dapat saling mempengaruhi. Kemudian dapat dikatakan bahwa Hubungan Internasional pada dasarnya meliputi negara

⁸ Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, *Introduction to Internastional Relations: Power and Justice* terjemahan Mercedes Marbun (Bandung: CV. Putra A. Bardin, 1981), hlmn. 3.

⁹Mochtar Mas’oed, *Ilmu Pengetahuan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3S,1990), hlmn. 28.

dan interaksi antar negara, yaitu analisi politik luar negeri dan proses yang berlangsung antar bangsa.

Selain itu, terdapat keterkaitan antara Hubungan Internasional dengan Politik Internasional, adapun pengertian Politik Internasional adalah: “Usaha memperjuangkan perbedaan-perbedaan atau sengketa nilai dan tidak timbul dari lingkungan yang objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia dalam kondisi tadi.”¹⁰

Dengan demikian, istilah Hubungan Internasional pada dasarnya memiliki makna yang lebih luas daripada istilah politik internasional. Berkenaan dengan pengertian politik internasional, **Hans J. Morgenthau** yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* memberi pengertian sebagai berikut:

Politik Internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Adapun tujuan akhir dari politik internasional. Tujuan menengahnya adalah kekuasaan, Negarawan-negarawan dan bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis, atau sosial.¹¹

Menurut **B.N Marbun** dalam bukunya *Kamus Politik*, menyatakan bahwa Politik Internasional merupakan:

Hubungan antar bangsa yang memiliki kekuatan, sumber daya, status, atau tujuan-tujuan yang diinginkan lainnya, yang berusaha untuk menghilangkan perbedaan itu dengan cara yang tersedia dan dapat diterima atau situasi yang berlangsung apabila suatu negara melakukan

¹⁰Ahmad Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori* (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 1991), hlmn. 41.

¹¹ Mochtar Mas’oed, *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT. Pustaka LP3Es, 1990), hlmn. 18.

tindakan yang dapat mempengaruhi politik negara lain, atau yang mengakibatkan terjadinya dampak politik.¹²

Pendapat para ahli diatas dirasakan masih terlalu luas pembahasannya, maka penulis berusaha untuk mempersempit kajian dari studi Hubungan Internasional ini pada salah satu ruang lingkupnya yaitu Hubungan Internasional Kawasan, Ekonomi Internasional, Politik Internasional, Politik Luar Negeri, Kerjasama Internasional, dan Organisasi Internasional serta tidak menutup kemungkinan terjadi korelasi dengan *core subject* (ruang lingkup) yang lain.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara¹³. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan

¹² B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlmn. 446.

¹³ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15.

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.¹⁴

Dalam pelaksanaan politik luar negeri setidaknya ada terdapat tiga *determinan* yang harus diperhatikan. Pertama, adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Politik luar negeri sebagai pencerminan dari kepentingan nasional dikemukakan oleh **J. Frankel** :

“Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”.¹⁵

Dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik diukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

Hal ini dipertegas dalam oleh pendapat **Saputra**, tentang Kepentingan nasional:

“Kepentingan nasional (*national interest*) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi *interplay* antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan

¹⁴James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*. (New York: The Free Press, 1980), Hlm. 171, 173.

¹⁵J. Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, Hal. 55

terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru”.¹⁶

Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri dan politik internasional adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik secara aktual maupun bersifat potensial. Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

“Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan”.¹⁷

Politik luar negeri sebagai serangkaian atau sekumpulan komitmen, mengacu kepada strategi, kepentingan dan tujuan-tujuan khusus (*specific goals*) serta sarana-sarana (*means*) untuk pencapaiannya. Komitmen dan rencana tindakan ini dapat ditelaah dari kondisi riil dan situasi nyata yang sedang berlangsung, sehingga dapat lebih mudah diamati dan dianalisa. Sebagaimana pandangan Jack C. Plano dan Roy Olton, bahwa:

“Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”¹⁸

¹⁶Sumpena Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Remaja Karya Offset, Jakarta, 1985, hal. 24.

¹⁷K.J. Holsti, *Op. Cit*, Hlm. 88

¹⁸Roy Olton dan Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan, Wawan, CV. Aardin, Bandung, 1990, Hal. 5

Pendapat tersebut diperkuat oleh **Mochtar Mas'oe**d yang memberikan dasar bagi analisis strategi politik luar negeri pada asumsi sebagai berikut:

1. Prilaku politik luar negeri suatu negara pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan pada ruang lingkup internasional.
2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negaranya.
3. Para pembuat keputusan harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara lain.¹⁹

Salah satu perwujudan dari kerja sama internasional adalah dengan terbentuknya organisasi internasional, sesuai dengan konstitusi pendiriannya setiap organisasi memiliki lapangan kerja yang spesifik, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pencerminan dari fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dapat bersifat abstrak dan fleksibel sehingga dapat dikatakan sebagai situasi dan kondisi yang akan terwujud pada masa yang akan datang. (**Coulumbus & Wolfe**, 1999: 279)

Adapun definisi dari Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh **Boermauna** dalam bukunya "*Hukum Internasional*", beliau berpendapat "Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri."²⁰

¹⁹Moechtar Mas'oe, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3S, Jakarta, 1994, hal. 90

²⁰ Boermauna, *Hukum Internasional Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2003), hlmn. 58.

Selain itu, dalam buku Kamus Hubungan Internasional, **Jack Plano** dan **Roy Olton** berpendapat bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai, “Suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.”²¹ Sedangkan dalam buku *Hukum Internasional II*, **Teuku May Rudi** berpendapat bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai: “*Any cooperative arrangement institute among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantages function implemented trough periodic meetings and staff activities*”.²²

Setiap negara atau organisasi internasional memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dalam mewujudkan tujuan nasionalnya, konsep Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara berbeda.²³

A Leroy Bennet menyatakan *organisasi internasional mempunyai ciri-ciri* sebagai berikut (*Bennet, 1995: 2-3*)

1. Organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.
2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.

²¹ Jack Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999) hlmn. 271.

²² Teuku May Rudi, *Hukum Internasional II* (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlmn. 78.

²³ Jack Plano dan Roy Olton, *Op. Cit.*, hlmn. 7.

3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional.
4. Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.
5. Sekertariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

Organisasi regionalisme di Asia Tenggara bisa di lihat dari pendekatan sistemik atau pendekatan sistem yang digunakan oleh **Donald McCloud** dimana ia menjelaskan bahwa Asia Tenggara diasumsikan sebagai bagian dari *subordinate state system* yang di dalamnya terdapat Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Cina.²⁴

Untuk mengaplikasikan dan menjalankan hubungan resmi antar pemerintah yang berdaulat diperlukan sarana untuk mencapai kepentingan, kesepakatan, kompromi, untuk itu perlu adanya cara yang dapat mewakilinya yaitu melalui jalur diplomasi. Adapun pengertian diplomasi menurut **A. Mansyur Effendi** dalam bukunya *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif-Azas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, sebagai berikut:

Diplomasi dapat pula diartikan sebagai perundingan, di dalamnya mengandung pengertian atau makna untuk menyusun dan mencari kesepakatan-kesepakatan bersama di dalam satu atau berbagai bidang antara dua negara atau lebih. Perundingan tersebut merupakan kegiatan diplomasi untuk saling memberi, menerima, dan saling menguntungkan antara masing-masing pihak.²⁵

²⁴ Donald G. McCloud, *Southeast Asia: Tradition and Modernity in the Contemporary World*, Boulder: Westview Press, 1995, hal. 16-19, yang dikutip dalam Cipto, Bambang, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.1.

²⁵A. Mansyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Diplomatik Bebas Aktif-Azas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa* (Jakarta: PT. Alumni, 1993). Hlmn. 65-66

Sir Ernest Satow sejak tahun 1992 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat yang kadangkala diperluas dengan hubungan antara negara-negara jajahannya.

Sejalan dengan definisi Satow, **R.P. Barston** mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

Manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktifitas-aktifitas terkait lainnya.²⁶

Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi pemerintah suatu negara saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bentuk teknis untuk menopang pemecahan masalah tersebut dan mengakhiri perundingan dengan membentuk berbagai perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses ini biasanya disebut kerjasama atau kooperasi.²⁷

Dalam kaitan ini **Teuku May Rudi** dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional*, menyimpulkan "*cooperative arrangements institute among state*" adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk

²⁶ R.P. Barston *Modern Diplomacy* (New York: Longman, 1997), hlmn. 1.

²⁷ K.J. Holsti, *Op. Cit.*, hlmn. 650.

melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”²⁸

Charles H. Cooley mengemukakan betapa pentingnya fungsi kerjasama yang diterjemahkan oleh **Soejono Soekanto** dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar*, adalah sebagai berikut:

“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada suatu saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”.²⁹

Selanjutnya pengertian tentang konsep kerjasama internasional sebagai berikut:

Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam manusia internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai arahan dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu identik.³⁰

Dewasa ini tumbuh berbagai berbagai kerja sama internasional sesuai dengan berbagai bidang kehidupan sosial, namun pada hakekatnya terdapat empat bentuk kerja sama internasional. (**Kusumohamidjojo**, 1987: 92-100).

1. Kerja sama Universal Hakekat dari kerjasama internasional yang univresal

²⁸ Teuku May Rudi, *Admisitrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 1998, hlmn. 2.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlmn. 80.

³⁰ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional* (Bandung: FISIP UNPAD Press, 1987), hlmn. 20.

(*global*) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerja sama Regional Merupakan kerja sama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produktifitas ekonomi dari negara-negara yang melakukan kerja sama, banyak menemukan apakah suatu kerja sama regional dapat diwujudkan.
3. Kerja sama Fungsional Negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa, sehingga kerja sama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Kerja sama fungsional berdasarkan dari cara berpikir pragmatis yang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerja sama .
4. Kerja sama Ideologi Merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global.

Kegiatan membangun kerjasama didasari pada berbagai kepentingan. Dewasa ini kerjasama internasional memberikan penekanan pada kegiatan ekonomi dan politik, khususnya pada pelaksanaan Ekonomi Politik Internasional. Dalam perkembangan Ekonomi Politik Internasional, ASEAN telah membuktikan

kemampuannya dalam merubah peta politik dan kontelasi perdagangan serta ekonomi internasional.

Ekonomi internasional sering muncul di dalam percaturan politik internasional, bersamaan dalam globalisasi bidang ekonomi dan menunjukkan bahwa setiap negara menuju pada perbaikan ekonomi dalam negerinya serta tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut sebagai suatu sistem ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional menurut **Dominick Salvatore** yang diterjemahkan oleh **Rudi Sitompul** dalm bukunya, *International Economic* yakni sebagai berikut, “Ekonomi Internasional adalah Suatu aktifitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dengan bersifat internasional.”³¹

Sementara itu adanya kejelasan antara ekonomi dengan hubungan internasional, dikarenakan ekonomi internasional merupakan bagian dari kajian hubungan internasional itu sendiri. Sesuai dengan konsep interdependensi di bidang ekonomi dalam kehidupan suatu negara dengan negara lain dalam komunitas internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Boediono Kusumohamidjojo, dalam bukunya *Ekonomi Internasional*, pengertian Ekonomi Internaisonal adalah:

Ekonomi Internasional memepelajari masalah yang berkaitan dengan hubungan anatar negara dnegan negara lain. Perkataan hubungan ekonomi disini mencakup paling tidak tiga bentuk hubungan yang berbeda, meskipun antar satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Pertama, merupakan pertukaran hasil atau output satu negara dnegan negara lain yang dikenal sebagai hubungan perdagangan. Kedua, bentuk pertukaran atau aliran sarana produksi. Ketiga, hubungan

³¹ Dominic Salvatore, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlmn. 5.

ekonomi antar negara bisa dilihat dari segi konsentrasinya terhadap utang-piutangnya atau singkatan dari hubungan kreditnya.³²

Guna mencapai tingkat ekonomi yaitu tingkat kemakmuran atau kekayaan maka politik internasional menjadi mekanisme di dalam mencapai kepentingan ekonomi suatu negara. Sehingga terbentuk interaksi antara ekonomi dan politik dengan tujuan pengejaran kekuasaan dan kekayaan.

Robert Gilpin menyatakan *Ekonomi Politik Internasional* sebagai:

“Ekonomi-politik internasional, merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional”.³³

Secara sederhana dapat dikatakan ekonomi-politik internasional adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Adapun definisi ekonomi-politik menurut **Mochtar Mas’oed** adalah sebagai berikut:

“Ekonomi-politik internasional sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar” antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.”³⁴

T. May Rudi juga memberikan definisi yang sama pada Ekonomi-Politik Internasional, sebagai berikut:

“....Sebuah kajian aplikatif empiris yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi).”³⁵

³² Boediono Kusumohamidjojo, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlmn. 1.

³³ Robert Gilpin, *US and The Multinational Corporation. Dalam Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-politik Internasional, dan Tatanan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlmn. 224.

³⁴ Mochtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlmn. 4.

³⁵ Rudy T. May, *Ekonomi-Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi* (Bandung: Nuansa, 2007), hlmn. 15.

Seorang bangsa Inggris, kritikus terkemuka terhadap prinsip-prinsip merkantilisme. Dari polemik multisegi yang termuat dalam karyanya *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations*; merupakan alur pandang yang mendasari pemikiran madzhab klasik yang tertuang dalam teori **Adam Smith** tentang ekonomi politik seperti kritiknya atas Merkantilisme mengenai hubungannya antara kekayaan dan kekuasaan. Walaupun ia tidak membantah, bahwa kekuasaan suatu negara itu sebagian bergantung pada kekayaan, namun ia menyerang pendapat bahwa Merkantilisme tentang cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan adalah melalui tindakan politik langsung. Pemerintah tidak perlu untuk menunjukkan pilih kasih (*favouritism*) terhadap industri-industri tertentu.

Dalam pandangan **Adam Smith**, mereka hendaklah membiarkan kekuasaan membuat keputusan-keputusan ekonomi berada ditangan orang-orang ekonomi (*economics agent*) itu sendiri. Ia juga sangat mendukung doktrin terkenal Physiokratis **Quesnay** dan **Turgot** *laissez faire, laissez aller*. Bahwa negara jangan intervensi tetapi hendaklah memberikan kekuasaan kepada perusahaan dan agen komersial untuk mengatur diri mereka sendiri atau realokasi kekuasaan dalam masyarakat. **Smith** juga menyangsikan bahwa desentralisasi sanggup menyelesaikan semua permasalahan politik masyarakat. Ia juga mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa para agen ekonomi itu tidak akan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan terutama pada kontrol pasar dan penetapan harga?

Menurut tulisan **J. Smeler**, dalam karyanya *The Sociology of Economic Life*, **Adam Smith** mengasumsikan teorinya dengan dua cara:

1. Ia memasukan suatu asumsi kedalam teorinya yang merupakan unsur inti dari paham “pasar persaingan sempurna”. Asumsi bahwa tidak ada perusahaan individual yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga atau total output suatu industri. Tidak ada agen ekonomi yang sekaligus agen politik. **Smith** menyadari bahwa dalam praktik, para pengusaha itu dan yang lainnya berusaha mengatur harga-harga dan output “orang-orang dalam usaha yang sama jarang yang bertemu bersama, tetapi percakapan dapat berakhir dengan komplotan (*conspiracy*) terhadap publik”. Ia merasakan bahwa kesepakatan ini tidaklah wajar dan tidak sah (*illgitimate*). Jika perekonomian itu bebas, maka para pengusaha akan mempergunakan modalnya untuk usaha-usaha yang paling produktif, dan pembagian pendapatan dapat menemukan sendiri tingkatnya yang wajar di pasar. Perekonomian akan mengatur dirinya sendiri.
2. Ia mengasumsikan pula, bahwa beberapa kendala politik umum adalah perlu untuk mencegah para pengusaha terlalu mengejar kepentingan dirinya sendiri dengan cara tak terkedali. Misalnya, negara hendaklah mengadakan undang-undang untuk menjamin bahwa penjualan dan kontrak itu dihormati; negara jangan pilih kasih dalam kelompok-kelompok tertentu dalam perekonomian. Jadi bahkan berdasarkan asumsi *laissez faire*-pun negara tidak sama sekali pasif. Ia memberika ‘setting’ moral, legal dan institusional yang mendorong perusahaan secara keseluruhannya, tetapi tidak ada usaha-usaha bisnis tertentu (**Smeller**. 1990;16-17)

Dalam studi Hubungan internasional terkait dengan tema integrasi ekonomi di kawasan, integrasi memiliki irisan studi yang sangat erat dengan ‘*Studi Kawasan (Area Studies)*’. Bahkan dalam aplikasi analisis, istilah *region* (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpang tindih. Oleh karena itu definisi tentang regionalisme akan banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam studi kawasan.

Sebagaimana Mansbaach mendefinisikan Region atau kawasan adalah “pengelompokan regional di identifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”. (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbaach: 1973). Sementara itu, menurut **Columbus** dan **Wolfe**³⁶ dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations, power and justice* terdapat 4 cara atau kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjukkan sebuah kawasan atau region:

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara dengan berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya, seperti Eropa dan Asia.
2. Kriteria Politik dan Militer: mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.

³⁶Theodore A. Coulombis, *International Relations: Powers and Justice*, Terjemahan, Drs. Marsedes Marbun, (Bandung: CV. Abardin, 1990), Hlm. 312.

3. Kriteria Ekonomi: Mengelompokan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan output Industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
4. Kriteria transaksional: mengelompokan negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran dan turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat dilihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan pasar tunggal Eropa.

Kemudian, **Bruce Russett**³⁷ juga mengemukakan kriteria suatu *Region* atau kawasan, yaitu:

1. Adanya kemiripan sosikultur;
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip yang biasanya tercermin pada voting dalam sidang-sidang PBB;
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supranasional atau antarpemerintah.
4. Interpendensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional; dan
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara-negara tersebut.

Salain itu **Teuku May Rudi** dalam bukunya *Studi Kawasan: sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, menjelaskan kawasan adalah:

³⁷Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 154

“Dalam studi kawasan, yang lazim disebut pula studi wilayah (*Areas Studies*) terdapat tiga model atau pola kajian utama, yaitu: (i) Kajian ciri-ciri khusus (*typical Studies*), (ii) kajian peristiwa-peristiwa (*Studi of Events*) dan, (iii) Kajian kecenderungan regionalisme (*regionalism*) dan Organisasi Kerja Sama Regional (*Regional Cooperation*)”.³⁸

Kerja sama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukakan regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerja sama intra-regional. Dengan kata lain, negara-negara dalam satu kawasan telah melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk tertinggi dari kerja sama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini sendiri terbagi ke dalam dua tingkat. *Pertama*, disebut sebagai integrasi dangkal (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa integrasi dalam (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Pada kenyataannya komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas *geselleshaft*, yaitu suatu masyarakat yang terbentuk dari suatu komponen (masyarakat) yang beraneka ragam, namun saling membutuhkan tergantung satu sama lain (Amri Marzali, “Membangun Sebuah Komunitas ASEAN

³⁸Teuku May Rudy, *Studi Kawasan: sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*. (Bandung: Bina Budhaya, 1997). Hlm. 8.

yang Berpusatkan Masyarakat”).³⁹ Sedangkan **Sheldon W. Simon** berpendapat bahwa Asia Tenggara harus dipahami sebagai sebuah kawasan dan bukan sistem, karena dalam kawasan tersebut terjadi hubungan yang tumpang tindih dalam sektor politik, ekonomi, dan militer, tetapi diakui olehnya bahwa ASEAN adalah sistem politik yang paling terlembaga di kawasan tersebut.⁴⁰ Pengertian pasar tunggal atau bersama disini adalah terciptanya kondisi adanya perdagangan bebas secara penuh serta modal dan pekerja bebas bergerak.⁴¹

Dengan adanya *ASEAN Community* yang memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama khususnya di bidang ekonomi antar sesama negara anggota ASEAN beserta para mitranya yang terdiri dari: ASEAN +1, ASEAN +2, ASEAN +3, ASEAN +6, dan juga ASEAN +8, serta menghasilkan berbagai kebijakan ekonomi dan politik, hal tersebut bertujuan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kawasan dan global serta kemajuan pembangunan arsitektur kawasan sehingga memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat ASEAN khususnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa:

1. Kita bisa melihat bagaimana dampak dari ASEAN Community ini dari berbagai aspek salah satunya yaitu aspek ekonomi. Motivasi ekonomi

³⁹ Amri Marzali, “Membangun Sebuah Komunitas ASEAN yang Berpusatkan Masyarakat”, Seminar Deplu-RI, Jakarta 10 Agustus 2006, hlmn. 1-2 luhulima, CPF, *Masyarakat ASIA Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlmn. 29.

⁴⁰ Sheldon W. Simon, *East Asia* dalam *World Politic*, diedit oleh James N. Rosenau, Kenneth Thomson, and Gavind Boyd, New York: Free Press, 1976, hlmn. 528-551. Dikutip dalam Cipto Bambang, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlmn. 2.

⁴¹ Luhulima, CPF, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlmn. 199.

melalui Komunitas Ekonomi ASEAN yaitu upayanya dalam mewujudkan ASEAN sebaga pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang bedaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, serta kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi secara global.

2. Kerjasama Ekonomi ASEAN menimbulkan adanya saling ketergantungan antara unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara sehingga masing-masing negara berupaya saling meningkatkan hubungan yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya.
3. Jika dilihat dari aspek ekonomi-politik internasional, kerjasama ekonomi ASEAN merupakan peluang khususnya bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan di kawasan yaitu berupa kekuasaan atas kebebasan, keamanan, serta kemakmuran sesuai dengan keinginan Indonesia. Hal ini dilihat dari besarnya peran Indonesia dalam setiap perkembangan ASEAN dari awal pembentukan dan proses integrasi hingga saat ini, serta berbagai keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia mulai dari aspek wilayah, SDA, bahkan SDM.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Di dalamnya terdapat dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris guna menemukan kesahihan (reliabilitas) atau kebenarannya.⁴² Berdasarkan perumusan masalah, kerangka pemikiran dan

⁴² Oman Heryaman (ed.), *Panduan Penyusunan Skripsi* (Bandung: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAS, 2008), hlmn. 35.

asumsi yang telah dikemukakan diatas, maka penulid dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

“Apabila Indonesia mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam konteks kerjasama *ASEAN Economic Community*2015dengan memanfaatkan posisinya yang strategis, maka proses kesiapanIndonesia menjadi kekuatan ekonomi dikawasan semakin cepatdan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (makro).”

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Tabel 1.2

Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas: Apabila Indonesia mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam konteks kerjasama <i>ASEAN Economic Community</i> 2015 dengan memanfaatkan posisinya yang strategis,</p>	<p>1. Adanya sejumlah kesepakatanintegrasi ekonomi global dan kesepakatanintegrasi ekonomiregional ASEAN dalam konteks <i>ASEAN Economic Community</i>.</p>	<p>1. Data dan fakta: Kesadaran akan pentingnya liberalisasi (pembebasan pasar) dirumuskan dalam <i>The Atlantic Charter</i> 1941. Dimanifestasikan dalam Rejim Internasional seperti WTO (GATT dan <i>Uruguay Round</i>) , IMF dan Bank Dunia, yang merupakan dasar terbentuknya integrasi ekonomi global maupun regional. (Diolah dari Yanuar Ikbar, Drs., M.A.: Ekonomi Inter-nasional konomi, hlmn. 111 s.d 125).</p>

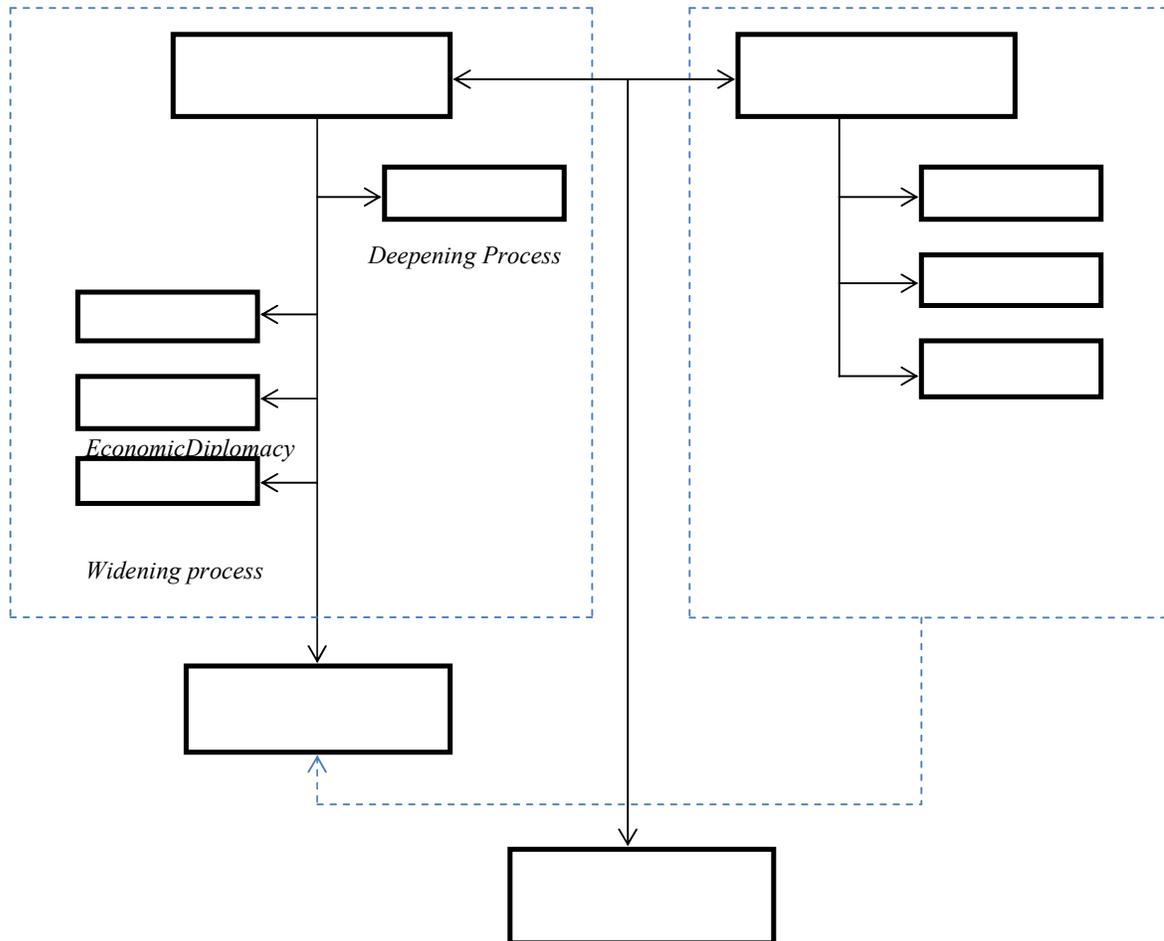
	<p>2. Proyeksi <i>ASEAN Economic Community</i></p>	<p>2. Data dan Fakta: Penyatuan ekonomi Eropa dalam <i>Single Act</i> yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1993 yang memicu percepatan pembentukan kerjasama regional atau integrasi ekonomi regional di kawasan lain seperti NAFTA di Amerika Utara, AFTA di Asia Tenggara dan <i>Free Trade Area</i> APEC di Asia Pasifik. (Diolah dari Soesastro, Hadi, <i>Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa</i>, (Jakarta: CSIS, 1991), hlm. 86-87).</p> <p>3. Data dan fakta: Adanya kesepakatan kerjasama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN dalam proses percepatan integrasi ekonomi kawasan. Dengan ditandatanganinya <i>ASEAN Vision 2020</i> (1997), <i>ASEAN Concord II</i> (2003) dalam pembentukan <i>ASEAN Community</i>. (Diolah dari Buku Penerbitan Departemen Perdagangan RI: <i>Menuju ASEAN Economic Community 2015</i>, hlm.1-29).</p> <p>4. Data dan Fakta: Percepatan integrasi ekonomi kawasan melalui AEC diatur dalam <i>ASEAN Charter</i>, dan <i>AEC Blueprint</i> yang ditandatangani pada 2007. (Diolah dalam Sekertariat Nasional</p>
--	--	--

	<p>3. Kerjasama Ekonomi Strategis Indonesia dan negara-negara ASEAN menuju AEC 2015</p>	<p>ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia: <i>ASEAN Menghadapi Era Perdagangan Bebas</i>, hlm.9)</p> <p>5. Data dan Fakta: Bentuk integrasi ekonomi ini dimulai dari sebuah inisiatif dari beberapa anggota utama ASEAN pada Juli 1991, khususnya negara Thailand mengajukan konsep ASEAN Free Trade Area (AFTA). (CPF. Luhulima, <i>ASEAN: The Way a Head</i>”, kertas kerja dalam seminar <i>Experiences in Regional Cooperation and Integration</i>, dalam Awani Irewati (Eds.), <i>Regionalisme Ekonomi di Asia Pasifik: Prespektif Indonesia</i>, LIPI , hlm. 77)</p>
<p>Variabel Terikat: maka proses kesiapan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dikawasan semakin cepat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (makro).</p>	<p>1. Diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan dan di luar kawasan</p>	<p>6. Data dan fakta: Keterbukaan dan liberalisasi kebijakan ekonomi Indonesia, berdasarkan aspek internasional dan aspek domestik. (Diolah dari Mari Pangestu, Syahrir, Ari. A: <i>Indonesia dan tantangan ekonomi global</i>, CSIS, hlmn. 20-26)</p> <p>7. Data dan Fakta: Peran keanggotaan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN dalam KTT G20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang, serta sebagai wadah untuk instrumen polugri guna mendukung upaya</p>

	<p>2. Posisi Indonesia dalam menghadapi <i>ASEAN Economic Community</i> 2015</p>	<p>Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025. (Diolah dari bookmark Kementerian Luar Negeri: <i>Diplomasi</i>, hlm. 225)</p> <p>8. Data dan Fakta: Konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di selat malaka. (Diolah dari Lidya Christin Sinaga Seminar Intern, <i>Posisi Strategis Selat Malaka bagi China, Jepang, AS dan India</i>: www.politik.lipi.go.id)</p> <p>9. Data dan Fakta: Peluan Integrasi ekonomi dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi da daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara dikawasan. (Diolah dari, Kementerian Perdagangan RI Bookmark: <i>Menuju ASEAN Economic Community 2015</i>, hlm. 215)</p> <p>10. Data dan Fakta: Hambatan-hambatan dalam Pembentukan AEC 2015, tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih</p>
--	--	---

	<p>3. Efektivitas AEC 2015 dalam peluang Indonesia menjadi kekuatan Ekonomi di kawasan.</p>	<p>lagi persaingan dengan negara-negara ASEAN dan diluar ASEAN seperti Cina dan India.</p> <p>(Diolah dari, Kementerian Perdagangan RI Bookmark: <i>Menuju ASEAN Economic Community 2015</i>, hlm. 216)</p> <p>11.Data dan fakta: Peningkatan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional (makro) (Diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Neraca Pembayaran Bank IndonesiaBank Indonesia, Biro Riset dan Kebijakan Ekonomi Monete-Bookmark: <i>Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012, Integrasi Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Nasional</i>, hlm. 36-38)</p> <p>12.Data dan Fakta: Peningkatan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia Bilateral dan Multilateral (China, Jepang, dan Amerika Serikat) (Diolah dari bookmark Kementerian Luar Negeri: <i>Diplomasi</i>, hlm. 225)</p>
--	---	--

4. Skema Kerangka Teoritis



Gambar 1.1 : Skema Teoritis

E. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Tingkat Analisis

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variable yang dipengaruhi) yaitu: “Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di Kawasan Asia

Tenggara dan akan dijadikan sebagai unit analisis yang di kategorikan dalam tingkat analisa Negara Bangsa. Sedangkan, variabel independen yang dijadikan sebagai unit Explanasi yaitu: Kerjasama Ekonomi ASEAN dalam konteks ASEAN Community, akan digunakan sebagai unit penjelas dalam pada tingkat Negara Bangsa.

Sehingga, dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis di dalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis korelasionis yakni unit analisis negara bangsa dalam variabel bebas yang dipengaruhi secara koheren dari unit eksplanasi negara bangsa dalam variabel terikat.

b. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bentuk metode penelitian yaitu:

- a) Metode Korelasional Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mencari, mengkaji serta menganalisa ada tidaknya hubungan atau derajat hubungan antara dua atau lebih gejala.
- b) Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang tersedia di tengah-tengah realita yang ada. Data diorganisasikan secara sistematis untuk melukiskan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam pelaksanaannya metode

ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.

- c) Metode Historis Analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

c. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dari :

- a) Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai bahan bacaan baik dari buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya.
- b) Wawancara/ Interview dengan para pakar dibidang kajian Ekonomi tentang kerjasama ASEAN dalam konteks ASEAN Community.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat-tempat dimana kita mendapatkan data melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara yang harus dirinci satu per satu tempatnya secara lengkap dan jelas. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat pencarian data dalam penelitian ini:

1. **Departemen Luar Negeri Republik Indonesia**
Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia
2. **ASEAN secretariat**
Jl.sisingamangaraja No.70A.Jakarta
3. **Center for Strategic International Studies (CSIS)**
Jl.Tanah Abang III No.23 -27. Jakarta
4. **Perpustakaan SESKOAD Bandung.**
Jl. Gatot Subroto No. 96 Bandung
5. **Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung**
Jalan Lengkong besar No. 68 Bandung

2. **Lama Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih satu semester atau enam bulan, terhitung dari bulan Desember 2011, yang merupakan tahap awal pengumpulan data, dan selesai bulan juni 2012.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian pembukaan suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantar dalam kerangka pemahaman permasalahan

yang dikaji dalam penelitian. Di dalamnya bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ASEAN Economic Community (AEC) 2015

Bab ini menjelaskan informasi umum antara lain : Tujuan pembentukan ASEAN Economic Community, bagaimana proses terbentuknya AEC serta perkembangannya menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Ruang lingkup, dinamika dan mekanisme kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN beserta Mitra Strategisnya dalam orientasi tercapainya tujuan-tujuan ASEAN Economic Community.

BAB III Diplomasi Ekonomi Indonesia di ASEAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana praktek-praktek diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia di ASEAN dan seluruh Mitra Strategisnya sebagai langkah-langkah strategis untuk memberikan pengaruh kekuatan ekonomi di kawasan.

BAB IV Analisis Peluang Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara (2015)

Bab ini akan memaparkan analisa atas hubungan variabel bebas dan variabel terikat yakni kerjasama ekonomi ASEAN dalam konteks ASEAN Communiy 2015 baik dalam kerangka peluang maupun tantangan hingga saat ini serta faktor-faktor keunggulan dan kelemahan posisi Indonesia. Guna menganalisa pengaruhnya terhadap peluang Indonesia menjadi kekuatan utama ekonomi di kawasan.

BAB V Kesimpulan

Dalambab ini penulis akan mengutarakan kesimpulan yang telah diperoleh dalam menjawab atas penelitian yang telah dilakukan tersebut serta memberikan saran yang relefantif dalam kajian hubungan internasional pada umumnya.